

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi kelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang periode 3 Bulan di Triwulan IV Tahun 2024 untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dapat memberikan banyak manfaat, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dan umumnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta sektor terkait lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas peran sertanya dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua.

Serang, Juli 2024

PIt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG,

> <u>Drs. AJAT SUDRAJAT, M.Si</u> NIP. 197011041991011001

#### **DAFTAR ISI**

KATA PE	ENGANTAR	i
DAFTAR	ISI	ii
DAFTAR	TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar belakang	1
1.2.	Landasan hukum	3
1.3.	Maksud dan tujuan	6
1.4.	Sistematika penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH	8
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	8
2.2.	Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3.	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	18
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024	21
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
DAD IV	DEMITTID	20

#### **DAFTAR TABEL**

2.1.1	Evaluasi Hasil Renja BPBD Kabupaten Serang TW II Tahun Anggaran 2024	9
2.1.2	Realisasi Anggaran TW II Tahun Anggaran 2024 BPBD Kabupaten Serang	13
2.2.	Target dan Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	16
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 BPBD Kabupaten Serang	22
3.1.	Pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Sesuai Ranwal RKPD Perubahan Tahun2024	29
3.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 BPBD Kabupaten Serang	30
3.3.	Usulan Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2024 BPBD Kabupaten Serang	36

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, yaitu disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dalam 1 tahun terdapat 2 kali penyusunan dokumen, yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran murni serta penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran perubahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Serang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Serang, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Serang yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub Urusan Penanggulangan Bencana. Tahun 2024 adalah tahun ke-4 pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut, dan saat dokumen ini disusun sedang memasuki tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja PD atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil diunit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Perubahan Renja PD tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang di anggaran perubahan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

#### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
   Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodesikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Serang;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
   Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
   (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Serang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
   APBD Perubahan Kabupaten Serang TA 2023;
- 22. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
- Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
   Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   Kabupaten Serang;
- 24. Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Serang;
- Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana
   Strategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Bupati Serang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah :

- Sebagai dokumen perubahan Perencanaan Jangka Pendek yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada masa perubahan anggaran dengan tetap mengacu dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Memberikan arah dan pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan untuk perubahan anggaran dalam menentukan prioritasprioritas di bidang kebencanaan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam upaya meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2024 adalah:

- Menjabarkan rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang di Perubahan Anggaran tahun 2024;
- 2. Menetapkan perubahan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal apabila terdapat perubahan kebijakan di anggaran perubahan;

- Sebagai arah dan acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- 4. Sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- Untuk keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 6. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan; dan
- 1.4. Sistematika penulisan.

### BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaiannya;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024.

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### **BAB IV PENUTUP**

#### BAB II

#### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Kabupaten Serang Triwulan II Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub-urusan Penanggulangan Bencana dan Sub-urusan Penanggulangan Kebakaran

Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala akan tetapi masih dapat teratasi dengan baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian dari rencana kegiatan dengan pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 bahwa prosentase rata-rata capaian kinerja mencapai 60,08 %. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dibawah.

**Tabel 2.1.1** 

#### **EVALUASI HASIL RENJA** BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG PERIODE PELAKSANAAAN: TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 Realisasi Canaian Kineria ingkat Canajan Kineri: alisasi Kineria dan Anggara Tingkat Canaian Target RENSTRA pada Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Indikator Kinerja sasaran/Program RENSTRA sampai dengar RENSTRA s/d Tahun 2024 Kinerja dan Tahun 2026 (Akhir Anggaran RKPD Tahun nggaran RKPD Tahun 2024 Urusan/Bidang Urusan (Outcome)/ kegiatan (Output) RKPD Tahun 2023 Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Renstra Periode RENSTRA) 2024 yang dievaluasi yang dievaluasi Pemerintahan daerah dan (2021+2022+2023) 2024 (%) RKPD Tahun 2026) s/d Tahun 2024(% IV Program/Kegiatan ш K Indikator (output) 1 2 14 = 13/8\*100 15=7+13 16=(15/6)\*100% 6 10 11 12 13=9+10+11+12 PROGRAM PENUNJANG LIRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 862.446.722 185.354.191 115.808.870 Penyusunan Dokumen umlah dokumen perencanaan Dokum 2 32 417.145.000 16 100.892.000 64.824.660 7.117.272 23.045.908 30.163.180 40,00 46,53 18 131.055.180 56,25 31,42 Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan umlah Laporan Capajan Kineria Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil Laporan 6 311.356.722 3 79.357.591 50.984.210 1.230.000 3.361.400 0 4.591.400 9,01 83.948.991 50,00 26,96 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daeral 4 133.945.000 0 5.104.600 5.104.600 0,00 3,81 Perangkat Daerah Administrasi Keyangan Perangkat 46.790.813.739 9.107.981.558 22.874.348.11 Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang menerima gaji Orang/b 4296 46 556 310 723 2034 22 815 624 899 720 9 048 817 000 1 584 820 25 2 549 130 12 330 4 133 950 38 45,83 45,68 2364 26 949 575 281 55,03 57,89 ASN dan tunjangan ASN ulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan okum dan Pengujian/Verifikasi Penguijan/Verifikasi Keuangan 12 48 234.503.016 12 58.723.218 59.164.558 13.966.382 13.971.816 6 27.938.198 50.00 47.22 18 86.661.416 37,50 36.96 Keuangan SKPD SKPD Administrasi Kepegawaian 153.673.674 943.466.104 494.936.758 Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan okum Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi 72 933.466.104 36 487.536.758 12 153.673.674 41.899.146 27.943.632 69.842.778 45,45 557.379.536 58,33 59,71 50,00 42 Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang-Jumlah Orang yang Mengikuti Jndangan Sosialisasi Peraturan Orang 10 10.000.000 10 7.400.000 10 7.400.000 100,00 74,00 erundangUndangan Administrasi Umum Perangkat 2.938.945.975 1.564.296.977 435.004.500 Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Paket 72 62.619.335 36 30.299.075 12 10.000.000 7.240.100 7.240.100 33,33 72,40 40 37.539.175 55,56 59,95 Kantor Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan umlah Paket Peralatan dar 0 10.749.200 Paket 6 332.323.975 3 105.192.301 15.000.000 10.749.200 71,66 115.941.501 50,00 34,89 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Jumlah Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72 36 12 8 41.654.300 Paket 442.013.400 223.257.901 50.000.000 1.000.00 40.654.300 66,67 83,31 264.912.201 61,11 59,93 Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan enggandaan yang Disediakan 72 251.954.600 36 114.452.100 30.004.500 12.822.500 3 12.822.500 42,74 127.274.600 54,17 50,51 Paket 25,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 72 371.305.000 36 228.470.100 12 60.000.000 3.728.800 17.977.500 6 21.706.300 50,00 36,18 42 250.176.400 58,33 67,38 Laporar Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan

88.123.60

6

137.389.700

50,00

50,89 42

1.000.015.200

58,33

67,63

49.266.100

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

72

1.478.729.665

36

862.625.500

12

270.000.000

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.682.535.437		1.909.105.849		679.567.943													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	558.865.260	33	243.385.108	12	78.823.197	3	23.278.209	3	20.957.724		6	44.235.933	50,00	56,12	39	287.621.041	54,17	51,47
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	2.112.659.789	36	1.188.833.117	12	407.935.000	3	56.268.841	3	124.017.584		6	180.286.425	50,00	44,19	42	1.369.119.542	58,33	64,81
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1.011.010.388	3	476.887.624	1	192.809.746		30.261.400		64.014.996		0	94.276.396		48,90	3	571.164.020	50,00	56,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.264.815.552		1.844.189.644		480.027.379													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	96	627.820.020	44	229.639.180	20	75.027.379	5	7.613.191	5	11.637.508		10	19.250.699	50,00	25,66	54	248.889.879	56,25	39,64
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	2.909.762.032	36	1.325.929.882	12	360.000.000	3	35.750.000	3	79.657.900		6	115.407.900	50,00	32,06	42	1.441.337.782	58,33	49,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	112.499.500	25	53.861.575	1	20.000.000				9.280.000		0	9.280.000	-	46,40	25	63.141.575	41,67	56,13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	410.000.000	2	144.757.007	1	-						0	-	-		2	144.757.007	40,00	35,31
 •	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	132	204.734.000	66	90.002.000	12	25.000.000			6	15.000.000		6	15.000.000	50,00	60,00	72	105.002.000	54,55	51,29

H													-	-							
PROGRAM																					
PENANGGULANGAN BENCANA													_								
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota				395.000.000		51.743.710		246.214.500													
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokume n	2	200.000.000	0	-	1	233.924.500				23.235.000			0	23.235.000	- 9,	3 0	23.235.000	0,00	11,62
Sosialisasi, Komunikasi, Informas dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	300	195.000.000	50	51.743.710	1	12.290.000				7.000.000			0	7.000.000	- 56,	50	58.743.710	16,67	30,12
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				447.000.000		-		4.865.800													
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	3	232.400.000	0	-	1	1.865.800							0	-	-	- 0	-	0,00	0,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	150	214.600.000	0	-	50	3.000.000							0	-	-	- 0		0,00	0,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				12.530.855.199		6.306.322.589		1.683.758.336													
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokume n	72	10.690.271.227	36	5.324.921.417	12	1.407.345.580	3	377.623.820	3	379.658.160			6	757.281.980 50	),00 53,	1 42	6.082.203.397	58,33	56,89
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	6000	1.840.583.972	2800	981.401.172	1000	276.412.756	250	73.245.492	250	76.807.724			500	150.053.216 50	54,	9 3300	1.131.454.388	55,00	61,47
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				3.037.599.364		1.673.238.780		355.180.511													
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokume n	16	1.050.324.000	12	899.881.300	1	-										12	899.881.300	75,00	85,68
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokume n	60	1.130.550.000	24	418.385.000	12	196.940.000	3	53.060.000	3	54.820.000			6	107.880.000 50	),00 54,	8 30	526.265.000	50,00	46,55
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokume n	6	856.725.364	3	354.972.480	1	158.240.511		43.138.719		43.163.172			0	86.301.891	- 54,	34 3	441.274.371	50,00	51,51

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON																					
KEBAKARAN   Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.337.948.280		7.344.111.119		2.134.630.301													
Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	36	5.164.942.176	36	5.252.787.631	12	1.348.884.185	3	361.627.865	3	364.428.620		6	726.056.485	50,00	53,83	42	5.978.844.116	116,67	115,76
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokume n	72	5.173.006.104	36	2.091.323.488	12	781.939.116	3	209.642.764	3	201.567.724		6	411.210.488	50,00	52,59	42	2.502.533.976	58,33	48,38
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	untuk Pencegahan dan	Unit	3	600.000.000	0	-	1	3.807.000						0	-	-	-	0	-	0,00	0,00
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				1.297.265.260		628.990.222		322.988.743													
Pendataan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokume n	60	1.297.265.260	24	628.990.222	12	322.988.743	3	88.054.247	3	88.100.436		6	176.154.683	50,00	54,54	30	805.144.905	50,00	62,06
Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				200.000.000		-		52.753.000													
Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	40	200.000.000	0	-	10	52.753.000				48.725.000		0	48.725.000	-	92,36	0	48.725.000	0,00	24,36
то	DTAL			87.133.691.632		44.876.637.956		15.772.455.115		3.062.592.505		4.407.091.629			7.469.684.134		47,36		52.346.322.090		60,08
							Rat	I :a-rata Kinerja (%)	60,08												
								Predikat Kinerja	-												

Realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 BPBD Kabupaten Serang

	Realisasi Anggaran Triwulan II T	andii 2024 Di BL	Nabupaten bei	any
NO.	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.824.660	32.491.816	50,12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.984.210	27.827.200	54,58
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.048.817.000	4.906.955.363	55,09
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	59.164.558	32.595.470	54,23
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	153.673.674	79.157.322	51,51
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	10.000.000	7.240.100	72,40
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	10.749.200	71,66
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	41.654.300	83,31
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.004.500	12.822.500	42,74
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	26.746.300	44,58
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	201.903.000	74,78
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.823.197	51.221.841	64,98
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.935.000	291.383.288	71,43
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.809.746	101.262.304	52,52
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.027.379	45.460.785	60,59
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.000.000	243.932.900	67,76
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	9.280.000	46,40

	JUMLAH TOTAL	<u>15.772.455.115</u>	9.074.594.352	<u>57,53</u>
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	52.753.000	48.725.000	92,36
29	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	322.988.743	205.521.495	63,63
28	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	781.939.116	477.136.396	61,02
27	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.348.884.185	844.726.025	62,62
26	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	158.240.511	100.689.615	63,63
25	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	196.940.000	125.580.000	63,77
24	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana Kabupaten/Kota	276.412.756	200.905.032	72,68
23	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.407.345.580	880.994.700	62,60
22	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000	-	-
21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.865.800	-	1
20	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	12.290.000	7.000.000	56,96
19	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	233.924.500	45.632.400	19,51
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	15.000.000	60,00

#### 2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah maka perlu dilakukan analisis kinerja perangkat daerah dengan membandingkan target dalam RENSTRA Perangkat Daerah dan capaian realisasi kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui apakah capaian kinerja pelayanan perangkat daerah mengalami peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai realisasinya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah tiap tahunnya. Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama 2021-2026

	Indikator Kinerja			Target	Renstra P	erangkat	Daerah			Realisa	si Capaia	n	Catatan
No.	Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TW II Tahun 2024	Catatan Analisis
1	Indeks Risiko Bencana	Score	203,10	203,05	203	202,80	202,50	200	176,14	154,18	136,82	*Capaian 2024 akan dikeluarkan BNPB akhir 2024	Realisasi kinerja melebihi target ( semakin rendah semakin baik)

KLASIFI	(ASI KELAS RISIKO BENC	CANA
SCORE	KELAS/ LEVEL	KATEGORI RISIKO
<13	1	RENDAH
13-144	2	SEDANG
> 144	3	TINGGI

Berdasarkan hasil data tersebut diatas, score Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Serang menurun sebanyak 17,36 point dengan kelas/level risiko di kelas 2 dengan kategori risiko berada kategori resiko bencana "Sedang". Walaupun sudah masuk dalam kategori "Sedang" ,Pemerintah Daerah Kabupaten Serang masih berupaya lebih keras untuk menurunkan score tingkat resiko bencana seoptimal mungkin dan hal ini harus melibatkan beberapa OPD terkait yang akan sangat terlihat keterlibatannya dalam pengisian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang cukup berpengaruh dalam menurunkan score Indeks Risiko Bencana (IRB).

#### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 2.3.1 Tantangan dan peluang

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- 2. Kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran.
- 3. Pemenuhan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran berkaitan dengan luas wilayah yang harus dipenuhi kebutuhannya terkadang menjadi kendala dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, personil serta anggaran.

Peluang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sudah terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) dan relawan di beberapa desa dan kecamatan serta telah terjalinnya kerjasama yang baik dengan dunia usaha sehingga penanggulangan bencana dan kebakaran dapat terbantu dan teratasi oleh personil dan sarana dan prasarana dari dunia usaha meskipun dengan kondisi kekurangan anggaran dan sarana prasarana.

#### 2.3.2 Isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan.

Isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2021-2026 sesuai RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

- 3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah;
- 4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran;
- 5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif;
- 7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- 8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan);
- 9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difocuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah;
- 10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh;
- 11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan;
- 12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai.

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Serang dalam lima tahun hendaknya harus memperhatikan isu-isu strategis tersebut di atas agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta mewujudkan peran dan fungsi daerah baik dalam hirarkhinya di lingkup regional dan nasional, maupun lingkup internal Kabupaten Serang sendiri.

Sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok fungsi yang dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, issu strategis yang menjadi prioritas adalah di Nomor 5 yaitu **Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.** 

Permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia baik untuk aparatur ataupun masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Belum tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon);
- 3. Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 4. Perlu adanya peningkatan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana:
- 5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 6. Perlu adanya peningkatan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi (penanganan pasca bencana) yang berasal dari anggaran daerah:
- 7. Masih kurangnya pemahaman prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berkaitan dengan rumusan isu strategis di RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, maka isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kesiapan aparatur dan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kebakaran;
- 2. Kesiapan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- 3. Response time atas setiap penanggulangan kejadian;
- 4. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung operasi dari setiap kegiatan.

#### 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada Perubahan RKPD tahun 2024 sudah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026.

Rencana program dan kegiatan di anggaran perubahan tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024 ini anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tidak mendapatkan tambahan pagu anggaran dan berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran Perubahan tahun 2024 masih terdapat kekurangan anggaran untuk pembayaran honor bulanan dan piket non ASN untuk bulan November dan Desember 2024 ,kekurangan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional lapangan ( Truk Damkar dan Water Supply ) serta kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana dan kebakaran dalam hal Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana dan pengadaan Sarpras Anggota Damkar. Berikut ini adalah review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024.

# Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024 BPBD KABUPATEN SERANG

		Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kinerja	Pagu	(Rp)	Kekurangan	Pagu Anggaran	
No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Indikator	Sebelum perubah an	Setelah Perubah an	Murni 2024 + Luncuran 2023	RKPD Perubahan 2024	Anggaran (Rp)	perubahan yang dibutuhkan (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
I	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.972.063.924	9.933.993.543		10.366.093.734	
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					115.808.870	115.808.870		Rp120.466.142	
1	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun serta pembayaran honor non-ASN staff non- ASN Subbag Progrev	dok bln	5 10	5 12	64.824.660	64.824.660	4.657.272	69.481.932	kekurangan honor bulanan 1 orang staff subbag progrev untuk bulan november, desember
2	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	dok	1	1	50.984.210	50.984.210		39.936.500	
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.107.981.558	9.107.981.558		9.117.296.102	
4	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bln	54	54	9.048.817.000	9.048.817.000		8.191.000.000	
5	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan terlaksananya pembayaran honor staff subbag Keuangan	lap bln	12 10	12 12	58.625.754	58.625.754	9.314.544	69.481.932	kekurangan honor bulanan 2 orang staff subbag keuangan untuk bulan november, desember

3	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					153.673.674	153.673.674	172.302.76	2
6	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan terlaksananya pembayaran honor Pramubakti	dok bln	12 10	12 12	153.673.674	152.777.262	18.629.088 172.302.76	kekurangan honor bulanan 4 orang Pramubakti untuk bulan november, desember
4	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					435.004.500	435.004.500	435.004.50	
7	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	12	10.000.000	10.000.000	15.000.00	
8	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	12	15.000.000	15.000.000	50.000.00	
9	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12	50.000.000	50.000.000	30.004.50	)
10	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	30.004.500	30.004.500	60.000.00	
11	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	12	12	60.000.000	60.000.000	15.000.00	)
12	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	12	12	270.000.000	270.000.000	270.000.00	
5	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

13	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan terlaksananya pembayaran honor tenaga Administrasi umum dan Kepegawaian	lap bln	12 10	12 12	78.823.197	78.823.197	13.971.816	93.137.289	kekurangan honor bulanan 3 orang staff subbag UMPEG untuk bulan November, desember
14	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	lap	12	12	407.935.000	407.935.000	70.000.000	477.935.000	Pembayaran Listrik kurang 3 bln
15	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan pembayaran honor staff administrasi Subbag Umum & Petugas Kebersihan	lap bln	12 10	12 12	192.809.746	192.809.746	13.971.816	203.151.962	Untuk HUT RI + HUT Kabupaten Serang dan kekurangan honor bulanan 1 orang OB + 2 orang staff Administrasi Umum untuk bulan November,Desember
6	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang									
		Urusan Pemerintahan Daerah									
16	5.01.01.2.09.0001		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya serta terlaksananya pembayaran honor driver Esselon II	unit bln	23 10	23 12	75.027.379	75.027.379	5.077.272	79.813.951	Untuk kekurangan honor bulanan 1 Orang driver Esselon II Bulan November,Desember
16	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya serta terlaksananya pembayaran honor				75.027.379	75.027.379 360.000.000	5.077.272	79.813.951 360.000.000	honor bulanan 1 Orang driver Esselon II Bulan

19	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	23	23	25.000.000	25.000.000		25.000.000	
II	5.01.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.290.019.147	2.290.019.147		2.662.491.851	
7	5.01.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					246.214.500	251.080.300		251.080.300	
20	5.01.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	orang	25	50	12.290.000	70.000.000		70.000.000	Sub Kegiatan pendukung SPM
21	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	1	1	233.924.500	181.080.300		181.080.300	Sub Kegiatan pendukung SPM
8	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					4.865.800	-	-	-	
23	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	12	-	1.865.800	-	-	-	
24	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	kawasan	1	-	3.000.000	-	-	-	

9	5.01.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1.683.758.336	1.768.094.048		1.989.735.592	
25	5.01.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat serta pembayaran honor & piket anggota non- ASN TRC & PUSDALOPS	Dok bln	1 10	1 12	1.407.345.580	1.407.345.580	254.425.440	1.661.771.020	kekurangan honor dan jasa piket 76 orang anggota TRC & PUSDALOPS bulan November, Desember
26	5.01.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta terlaksananya pembayaran honor bulanan dan piket petugas gudang/logistik	orang bln	1000	1000 12	276.412.756	300.181.508	51.551.816	327.964.572	kekurangan honor dan piket 15 orang petugas Sarpras & Logistik bulan November, Desember
10	5.01.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					355.180.511	355.180.511		421.675.959	
27	5.01.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia dan terlaksananya pembayaran honor piket anggota non- ASN HUMAS	Dok Bln	10 10	12 12	196.940.000	196.940.000	37.720.000	234.660.000	kekurangan jasa piket 12 Orang anggota HUMAS bulan November,Desember

28	5.01.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan serta pembayaran honor bulanan non-ASN petugas survey lokasi pasca bencana	kegiatan bln	12 10	12 12	158.240.511	158.240.511	28.775.448	187.015.959	kekurangan honor bulanan 10 orang petugas Survey Lokasi Pascabencana bulan November, Desember
Ш	5.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.510.372.044	2.510.372.044		2.959.713.836	
11	5.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.134.630.301	2.134.630.301		2.525.238.469	
29	5.01.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor dan piket anggota DAMKAR	bln	10	12	1.348.884.185	1.348.884.185	253.599.080	1.602.483.265	kekurangan honor dan jasa piket 74 orang anggota DAMKAR bulan November Desember
30	5.01.04.2.01.02	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya pembayaran honor dan piket anggota RESCUE DAMKAR	bln	10	12	781.939.116	781.939.116	137.009.088	918.948.204	kekurangan honor dan jasa piket 47 orang anggota RESCUE DAMKAR bulan November Desember
31	5.01.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD)	Terpenuhinya APD Pemadam Kebakaran sebanyak 10 Unit dan tempat penyimpanan	unit	0	8	3.807.000	3.807.000		3.807.000	

12	5.01.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					322.988.743	322.988.743		381.722.367	
32	1.05.04.2.02.00 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lin gkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran dan terlaksananya pembayaran honor bulanan petugas inspeksi APK non-ASN	Dok bln	12 10	12 12	322.988.743	322.988.743	58.733.624	381.722.367	kekurangan honor bulanan 18 orang petugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan APK bulan november Desember
13	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					52.753.000	52.753.000		52.753.000	
33	1.05.04.2.05.00 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	4	4	52.753.000	52.753.000		52.753.000	
			TOTAL				15.772.455.115	15.772.455.115	957.436.304	16.659.891.419	

#### **BAB III**

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut ini adalah jumlah pagu anggaran Rancangan Awal Perubahan Anggaran Tahun 2024 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Tabel 3.1.
Pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Serang Sesuai Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024 SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING	SETELAH PERUBAHAN
1	BPBD	15.772.455.115	123.332.926	15.649.122.190

Pagu anggaran Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebesar **Rp 15.772.455.115**,- dimana didalamnya sudah termasuk Belanja Barang Dan Jasa serta Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Dengan jumlah pagu anggaran tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pagu anggaran perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2024, dikarenakan masih ada kekurangan anggaran untuk tagihan Listrik bulanan serta pembayaran honor bulanan, honor jasa piket, tunjangan Non PNS dan BPJS Non PNS Bulan November & Desember tahun 2024.

Dengan berkurangnya jumlah pagu anggaran rancangan awal RKPD perubahan tahun 2024 maka mengakibatkan adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan anggaran perubahan tahun 2024 termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Satuan Indikator		Target Kinerja				Bertambah (+) / Berkurang (-) (Rp.)	
	(Output)	<del>-</del>	Renja	Sebelum perubahan	Perubahan Renja	Murni	Refocussing	Perubahan Renja	, , ,
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						10.972.063.924	10.972.063.924	10.972.063.924	-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.808.870	115.808.870	115.808.870	-
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	5	5	5	64.824.660	64.824.660	64.824.660	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	dok	1	1	1	52.216.500	52.216.500	52.216.500	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.107.981.558	9.107.981.558	9.107.981.558	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bln	56	56	54	9.048.817.000	9.048.817.000	9.048.817.000	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan terlaksananya pembayaran honor staff subbag Keuangan	lap	11	11	12	59.164.558	59.164.558	59.164.558	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						153.673.674	153.673.674	153.673.674	-

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan terlaksananya pembayaran honor Pramubakti	dok	11	11	12	153.673.674	153.673.674	153.673.674	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah						432.129.724	432.129.724	432.129.724	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	12	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	12	12	12.141.800	12.141.800	12.141.800	-
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12	12	49.975.000	49.975.000	49.975.000	1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	12	30.017.924	30.017.924	30.017.924	-
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	12	12	12	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	12	12	12	269.995.000	69.995.000	69.995.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						676.245.619	676.245.619	676.245.619	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan terlaksananya pembayaran honor TKK	lap	11	11	12	79.165.473	79.165.473	79.165.473	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	lap	12	12	12	407.900.000	407.900.000	407.900.000	-

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan pembayaran honor staff administrasi Subbag Umum & Petugas Kebersihan	lap	11	11	12	189.180.146	189.180.146	189.180.146	-
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.224.479	486.224.479	486.224.479	-
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	22	22	22	74.736.679	74.736.679	74.736.679	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	20	20	20	360.000.000	360.000.000	360.000.000	-
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	21	21	21	26.487.800	26.487.800	26.487.800	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	25	25	25	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.290.019.147	2.166.686.221	2.166.686.221	-
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota						246.214.500	122.881.574	122.881.574	-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	25	25	25	12.290.000	12.290.000	12.290.000	-

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dok	1	1	1	233.924.500	123.332.926	110.591.574	(123.332.926)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						4.865.800	4.865.800	4.865.800	
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	12	12	12	1.865.800	1.865.800	1.865.800	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.683.758.336	1.683.758.336	1.683.758.336	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat serta pembayaran honor & piket anggota non-ASN TRC & PUSDALOPS	dok bln	1 10	1 10	1 12	Rp1.407.345.580	Rp1.407.345.580	Rp1.407.345.580	-
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta terlaksananya pembayaran honor bulanan dan piket petugas gudang/logistik	Orang bln	1000 10	1000 10	1000 12	276.412.756	276.412.756	276.412.756	-
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						355.180.511	355.180.511	355.180.511	-

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia dan terlaksananya pembayaran honor piket anggota non-ASN HUMAS	Dok Bln	12 10	12 10	12 12	196.940.000	196.940.000	196.940.000	-
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan serta pembayaran honor bulanan non-ASN petugas survey lokasi pasca bencana	Keg bln	1 10	1 10	1 12	158.240.511	158.240.511	158.240.511	-
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						2.510.372.044	2.510.372.044	2.510.372.044	-
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.134.630.301	2.134.630.301	2.134.630.301	-
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ,Terlaksananya pembayaran honor bulanan dan piket anggota Damkar non-ASN	Lap bln	12 10	12 10	12 12	1.348.884.185	1.348.884.185	1.348.884.185	-
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran ,Terlaksananya pembayaran honor bulanan dan piket	Dok bln	12 10	12 10	12 12	781.939.116	781.939.116	781.939.116	-

	anggota Rescue Damkar non- ASN								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	8	8	8	3.807.000	3.807.000	3.807.000	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						322.988.743	322.988.743	322.988.743	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran dan terlaksananya pembayaran honor bulanan petugas inspeksi APK non-ASN	Dok bln	12 10	12 10	12 12	322.988.743	322.988.743	322.988.743	-
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						52.753.000	52.753.000	52.753.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	4	4	4	52.753.000	52.753.000	52.753.000	
	TOTAL					Rp15.772.455.115	Rp15.649.122.189	Rp15.649.122.189	(123.332.926)

Dikarenakan masih adanya kekurangan anggaran untuk pembayaran tagihan Listrik selama 3 bulan serta honor bulanan, honor jasa piket, tunjangan Non PNS dan BPJS Non PNS Bulan November & Desember tahun 2024, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar **Rp 957.436.304,-** untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Serang juga sedang kurang baik maka usulan penambahan anggaran pun hanya ditujukan untuk kebutuhan yang prioritas saja.

Berikut ini adalah rincian usulan permohonan penambahan anggaran perubahan Tahun 2024.

Tabel 3.3.
USULAN PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG

				Pagu (Rp.)		
Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Murni 2024	Refocussing	Sesuai SIPD RKPD Perubahan 2024	Kekurangan Anggaran (Rp)
1	2	3	5	6	7	8
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kekurangan honor bulanan 1 orang staff subbag program untuk bulan November & Desember	64.824.660	64.824.660	64.824.660	4.657.272
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kekurangan honor bulanan 2 orang staff subbag keuangan untuk bulan November & Desember	59.164.558	59.164.558	59.164.558	9.314.544
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	kekurangan honor bulanan 6 orang Pramubakti untuk bulan November & Desember	153.673.674	153.673.674	153.673.674	18.629.088
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kekurangan honor bulanan 3 orang staff subbag UMPEG untuk bulan November & Desember	79.165.473	79.165.473	79.165.473	13.971.816

Kencana	Kerja Perubahan Tahun 202	24				
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kekurangan tagihan Listrik 3 bulan	407.935.000	407.935.000	407.935.000	70.000.000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	kekurangan honor bulanan 1 orang OB + 2 orang staff Administrasi Umum untuk bulan November & Desember	189.180.146	189.180.146	189.180.146	13.971.816
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Untuk kekurangan honor bulanan 1 Orang driver Esselon II Bulan November & Desember	75.027.379	75.027.379	75.027.379	5.077.272
5.01.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
5.01.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kekurangan honor dan jasa piket 76 orang anggota TRC & PUSDALOPS bulan November & Desember	1.407.345.580	1.407.345.580	1.407.345.580	254.425.440
5.01.03.2.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	kekurangan honor dan piket 15 orang petugas Sarpras & Logistik bulan November & Desember	276.412.756	276.412.756	276.412.756	51.551.816
5.01.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
5.01.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	kekurangan jasa piket 12 Orang anggota HUMAS bulan November & Desember	196.940.000	196.940.000	196.940.000	37.720.000
5.01.03.2.04.0006	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kekurangan honor bulanan 10 orang petugas Survey Lokasi Pascabencana bulan November & Desember	158.240.511	158.240.511	158.240.511	28.775.448
5.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
5.01.04.2.01.0003	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kekurangan honor dan jasa piket 74 orang anggota DAMKAR bulan November & Desember	1.348.884.185	1.348.884.185	1.348.884.185	253.599.080
5.01.04.2.01.0002	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	kekurangan honor dan jasa piket 47 orang anggota RESCUE DAMKAR bulan November & Desember	781.939.116	781.939.116	781.939.116	137.009.088
5.01.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					
5.01.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	kekurangan honor bulanan 18 orang petugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan APK bulan November & Desember	322.988.743	322.988.743	322.988.743	58.733.624
		TOTAL				957.436.304
	1	l	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>

#### **BAB IV**

#### PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024 akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2024 dengan mengikuti hasil pembahasan dokumen KUA PPAS dan RAPBD oleh TAPD.

Jumlah pagu anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang masih cukup jauh dari jumlah kebutuhan pagu anggaran yang dibutuhkan, sehingga penyusunan anggaran difokuskan pada sub kegiatan prioritas yang mendukung pelaksanaan kegiatan rutin kedinasan, serta penanganan bencana dan kebakaran.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2024 ini disusun dengan harapan menjadi dokumen rujukan perencanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah yang aplikatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Serang dapat dilaksanakan berkelanjutan, tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Serang, Juli 2024
Plt. KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN SERANG

<u>Drs. AJAT SUDRAJAT, M.Si</u> NIP. 197011041991011001